

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Ratnasari
Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Halu Oleo, Kendari
Email :ratnasarinana85@yahoo.co.id

Tibertius Nempung
Universitas Halu Oleo

La Ode Suriadi
Universitas Halu Oleo

-Abstract

This study aims to to analze motor vehicles tax income in the province of Southeast Sulawesi and factors that affect it. To achieve the aim, panel data was used by combining cross-sectional data and time-series data. A technique of data analysis used was the fixed effect.

Result of the study show that simultatenously the variables of the number of motor vehicles, PDRB per capita, mutation of incoming vehicles, and tax arrears had significant effect on motor vehicles tax income in the province of Southeast Sulawesi, whereas partially inly the variable of tax arrears of motor vehicles that had insignificant effect and other variables statistically had insignificant effect on motor vehicles tax income in the province of Southeast Sulawesi

Keywords : Motor Vehicle Tax, Number Of Motor Vehicles, Panel Data

1.PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah– daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah yang dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha–usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Suhendi, 2007).

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kenderaan bermotor.

Pajak menjadi kewajiban bagi setiap warga Negara dan sifat pajak yang bersifat dapat dipaksakan yang dilakukan oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyikapi kewenangan yang dimiliki untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang memberikan landasan hukum dalam melakukan retribusi dan pajak daerah dalam rangka mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) dimana salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam hal pemungutan kendaraan bermotor, kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang berperan sangat penting. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 12 UPTD Samsat yang diharapkan menjadi sarana untuk memaksimalkan potensi pajak kendaraan bermotor dalam rangka peningkatan Penerimaan pajak daerah. Tujuan Penelitian Untuk menganalisis pengaruh jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, mutasi kendaraan masuk dan tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.KAJIAN LITERATUR

Pajak

Beberapa definisi telah dikemukakan oleh para ahli mengenai pajak diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki 2 fungsi menurut Resmi (2009) yaitu

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan

b. Fungsi Regureland (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Pajak dapat dikelompokkan beberapa hal dan berdasarkan wewenang, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu

a. Pajak Negara

b. Pajak Daerah. Pajak Daerah dibagi lagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota

Terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah (Prakoso, Kesit Bambang.2005) yaitu :

a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat

mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

- b. Teori kepentingan
Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.
- c. Teori daya pikul
Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.
- d. Teori bakti
Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.
- e. Teori asas daya beli
Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

Penerimaan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 ayat 8 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan PERDA sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Sumber-Sumber Penerimaan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Pendapatan lain-lain yang sah

Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Azhari A. Samudra (2005) : Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangga sebagai Badan Hukum Publik.

Adapun teori mengenai tolak ukur dalam menilai Pajak Daerah ada 5 (lima) yaitu (Mardiasmo, 2011):

- a. Hasil (*Yield*) dari suatu pajak daerah, apakah sudah memadai hasilnya, dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya juga dari perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut yang dikeluarkan.
- b. Keadilan (*Equity*) dalam arti harus benar beban dari tarif pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan adil
- c. Memiliki daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*) pajak yang hendaknya bisa mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.

- d. Kemampuan dalam melaksanakan suatu pajak (*Ability to Implement*) dimaksudkan bahwa pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah dalam mengumpulkan dana (*Suitability as a Local Revenue Source*) yang berarti harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak harus sama dengan tempat akhir beban pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat 1 Perda Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011).

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tenage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonage) (Pasal 4 ayat 2 Perda Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011).

Sementara itu Pasal 5 Perda Prov. Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 mengecualikan pengertian kendaraan bermotor pada :

- a. Kereta api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Mutasi Kendaraan Bermotor

Mutasi Kendaraan bermotor adalah perpindahan administrasi identifikasi kendaraan bermotor dari suatu daerah ke daerah lain sesuai dengan perpindahan alamat baru pemilik kendaraan bermotor.

Jenis mutasi sendiri ada 2.

- a. Mutasi luar provinsi. Kendaraan dari/ke lain provinsi. Kendaraan dari provinsi A ke Provinsi B.
- b. Mutasi dalam provinsi. Kendaraan dari/ke lain kabupaten masih dalam 1 provinsi. Kendaraan dari Kabupaten A prov. A ke kabupaten B Prov.A.

PDRB per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah.

PDRB perkapita menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Variabel yang digunakan untuk menghitung PDRB perkapita adalah produk nasional bruto dan jumlah penduduk.

Secara matematis, rumus perhitungan PDRB perkapita adalah sebagai berikut:

$$\text{PDRB perkapita} = \text{Produk Nasional Bruto (GNP)} / \text{Jumlah Penduduk}$$

Hambatan dalam Pembayaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2009) hambatan dalam pembayaran pajak terdiri dari :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) untuk membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran harus dilakukan di Kas Negara atau kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingankan wajib pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan.

Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak. Sedangkan pengertian tunggakan di dalam Kamus Bahasa Indonesia (Hoetomo, 2005) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tunggakan pajak menurut W.J de Langen dalam Bohari (2010) antara lain disebabkan oleh :

a. Kesadaran

Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi berarti pula moralitas perpajakan adalah juga tinggi.

b. Pendapatan

Mengenai prinsip pendapatan mempunyai dua bagian terpisah, tidak hanya dinyatakan bahwa pendapatan yang besar yang harus membayar lebih banyak, tetapi kenyataan juga bahwa mereka yang pendapatan rendah juga harus membayar pajak yang sama pula.

c. Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak.

d. Pelayanan

Pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan warga Negara memberikan kontraprestasi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemberian oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya, akan menimbulkan rasa kesadaran yang tinggi untuk mengabdikan kepada negara. Bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka rakyat akan berkurang juga kesadaran untuk memberikan kontraprestasi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak. Sehingga ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin tinggi jumlah tunggakan pajak. Menurut (Hoetomo, 2005).

3.METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk metode penelitian eksplanatif dimana penelitian ini akan menjelaskan sebab akibat antara variabel terikat dengan variabel bebas. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2009).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 12 Kantor UPTD Samsat Se-Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan bahwa data dan informasi terkait penelitian ini ada di kantor tersebut.

Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden (Pihak Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara). Data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian secara periode tertentu.

Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pihak Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara dan dokumentasi (proses mengumpulkan catatan-catatan/ data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/ kantor/ instansi atau lembaga terkait (Arikunto, 2002). Laporan-laporan yang terkait dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang menyangkut PDRB Per Kapita, jumlah mutasi kendaraan masuk serta tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, laporan penelitian, buletin, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

2. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006).

Sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah Kendaraan Bermotor (X1)
2. PDRB Per Kapita (X2)
3. Mutasi Kendaraan Masuk (X3)
4. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (X4)

Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data panel. Model regresi linier data panel merupakan salah satu solusi untuk menghasilkan estimasi yang efisien. Model tersebut akan menggabungkan observasi lintas sektoral dan data runtut waktu sehingga jumlah observasi akan meningkatkan derajat kebebasan dan mengurangi

kolinearitas antara variabel penjelas dan kemudian akan memperbaiki efisiensi estimasi ekonomi.

Adapun model yang akan digunakan adalah

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + U_{it}$$

dimana :

i = *cross section* (menunjukkan bahwa intersep untuk beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

t = *time series* (menunjukkan periode tahun 2005-2014)

β_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien

U = error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah dikemukakan di bab sebelumnya bahwa untuk melihat dampak jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, jumlah mutasi kendaraan masuk dan tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan model persamaan regresi data panel.

Analisis regresi data panel dapat dilakukan melalui 3 model estimasi, yaitu *Common Effect* (*Pooled Least Square*), *Fixed Effect* (FE), dan *Random Effect* (RE).

Penentuan model terbaik antara model *Common Effect* (*Pooled Least Square*), *Fixed Effect* (FE), dan *Random Effect* (RE) menggunakan tiga model estimasi model. Tiga teknik ini digunakan dalam regresi data panel untuk memperoleh model yang tepat dalam mengestimasi regresi data panel. Tiga uji yang digunakan, pertama *Chow Test* digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau *fixed effect*. Uji kedua, yaitu uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang digunakan untuk memilih antara model *Random Effect* dengan metode *common effect* dan yang terakhir adalah Uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara model *Fixed Effect* atau *random effect*.

Dan dari hasil uji estimasi dihasilkan model yang tepat untuk menganalisis penelitian ini adalah model *Fixed Effect*.

Dari hasil estimasi menggunakan model *fixed effect* diperoleh model persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$\text{PKB Kendari} = 1.754170 + 0.2192153X_1 + 0.039575X_2 + 0.014034 X_3 - 0.029306X_4$$

$$\text{PKB Konawe} = 1.115149 + 0.2192153X_1 + 0.039575X_2 + 0.014034 X_3 - 0.029306X_4$$

$$\text{PKB Kolaka} = 1.319775 + 0.2192153X_1 + 0.039575X_2 + 0.014034 X_3 - 0.029306X_4$$

$$\text{PKB Bau-bau} = 1.247301 + 0.2192153X_1 + 0.039575X_2 + 0.014034 X_3 - 0.029306X_4$$

$$\text{PKB Buton} = 0.007550 + 0.2192153X_1 + 0.039575X_2 + 0.014034 X_3 - 0.029306X_4$$

$$\text{PKB Muna} = 1.019784 + 0.2192153X_1 + 0.039575X_2 + 0.014034 X_3 - 0.029306X_4$$

$$\text{PKB Konsel} = 0.440428 + 0.2192153X_1 + 0.039575X_2 + 0.014034 X_3 - 0.029306X_4$$

$$\text{PKB Kolut} = -0.269868 + 0.2192153X_1 + 0.039575X_2 + 0.014034 X_3 - 0.029306X_4$$

$$\text{PKB Bombana} = -2.004660 + 0.2192153X_1 + 0.039575X_2 + 0.014034 X_3 - 0.029306X_4$$

$$\text{PKB Wakatobi} = -1.836809 + 0.2192153X_1 + 0.039575X_2 + 0.014034 X_3 - 0.029306X_4$$

$$\text{PKB Konut} = -1.768753 + 0.2192153X_1 + 0.039575X_2 + 0.014034 X_3 - 0.029306X_4$$

$$\text{PKB Butur} = -1.024067 + 0.2192153X_1 + 0.039575X_2 + 0.014034 X_3 - 0.029306X_4$$

Hasil estimasi diatas menunjukkan bahwa nilai intersep untuk kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara berbeda. Keadaan ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan pada nilai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Perbedaan itu bisa dilihat antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe adalah sebesar 0.64, antara Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Kolaka adalah sebesar 0.2 dan seterusnya dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bila dilihat dari nilai koefisiennya, tampak bahwa setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki nilai koefisien yang sama. Ini mengindikasikan pula bahwa perilaku antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara diasumsikan adalah sama.

Berikut hasil estimasi untuk keperluan analisa statisik, disajikan hasil estimasi regresi data panel pada tabel berikut:

Tabel Hasil Uji Regresi dengan Fixed Effect

Dependent Variable: LOG_Y? PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BRMOTOR
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.307764	0.178658	7.319939	0.0000
LOG_X1_JUM KEND BERMOTOR	0.192153	0.113704	1.689948	0.0940
LOG_X2_PDRB PER KAPITA	0.039575	0.022288	1.775604	0.0787
LOG_X3_MUTASI KEND MASUK	0.014034	0.006732	2.084594	0.0396
LOG_X4_TUNGGAKAN PKB	-0.029306	0.058685	-0.499374	0.6186
Fixed Effects (Cross)				
_KENDARI—C	1.754170			
_KONawe—C	1.115149			
_KOLAKA—C	1.319775			
_BAU—C	1.247301			
_BUTON—C	0.007550			
_MUNA—C	1.019784			
_KONSEL—C	0.440428			
_KOLUT—C	-0.269868			
_BOMBANA—C	-2.004660			
_WAKATOBI—C	-1.836809			
_KONUT—C	-1.768753			
_BUTUR—C	-1.024067			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.966412	Mean dependent var	7.335523
Adjusted R-squared	0.961567	S.D. dependent var	7.823983
S.E. of regression	0.511029	Sum squared resid	27.15965
F-statistic	199.4887	Durbin-Watson stat	1.693729
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Diolah (2016)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa secara statistik, jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, jumlah mutasi kendaraan masuk dan tunggakan pajak kendaraan bermotor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas ($F_{\text{statistik}}$) sebesar 0.000000 lebih kecil dari α 0,05 maupun α 1 persen.

Kontribusi naik turunnya jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, jumlah mutasi kendaraan masuk dan tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada nilai R^2 adjusted adalah sebesar 0.961567. Angka ini mengandung arti bahwa 96.15 persen Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara ditentukan oleh variabel jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, jumlah mutasi kendaraan masuk dan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dengan kata lain dampak variabel bebas dalam penelitian ini terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 96.15 persen sedangkan sisanya yaitu 3.85 persen ditentukan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Bila dilihat secara parsial, tampak pula hanya satu variabel yaitu tunggakan pajak kendaraan bermotor (X_4) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara sementara variabel lain yaitu jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita dan jumlah mutasi kendaraan masuk berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari tanda maupun besarnya koefisien regresi masing-masing variabel. Variabel Jumlah Kendaraan bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tanda positif, yang berarti bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menyebabkan peningkatan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun besaran pengaruh tersebut dapat dilihat dari koefisien regresinya sebesar 0.192153. Angka ini berarti bahwa jika jumlah kendaraan bermotor meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0.192 persen.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Amelia Afriani (2008), semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu saja akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa dengan semakin banyak jumlah kendaraan bermotor yang beredar di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara maka berdampak langsung terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Variabel PDRB per kapita terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tanda positif, yang berarti bahwa peningkatan PDRB per kapita akan menyebabkan peningkatan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun besaran pengaruh tersebut dapat dilihat dari koefisien regresinya sebesar 0.039574. Angka ini berarti bahwa jika PDRB per kapita meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0.04 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Peacock dan Wiseman yang dikutip dari Mangkoesobroto (1998) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mendorong terjadinya pendapatan per kapita masyarakat yang akan mendorong pula kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

PDRB per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh seorang penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Semakin besar PDRB per kapita di suatu daerah tentu

saja akan berdampak kepada tingkat pertumbuhan ekonomi, dimana jika tingkat pertumbuhan ekonomi membaik, pembelian kendaraan bermotor termasuk salah satu produk yang meningkat penjualannya. Dengan peningkatan pembelian kendaraan bermotor sebagai efek dari peningkatan PDRB per kapita, memungkinkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya variabel jumlah mutasi kendaraan masuk terhadap Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tanda positif, yang berarti bahwa peningkatan jumlah mutasi kendaraan masuk akan menyebabkan peningkatan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun besaran pengaruh tersebut dapat dilihat dari koefisien regresinya sebesar 0.014034. Angka ini berarti bahwa jika jumlah mutasi kendaraan masuk meningkat sebesar 1 persen maka akan meningkatkan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0.01 persen.

Secara teori yang dikutip dari Muhammad Lutfi Nur Usmani (2012). Jumlah mutasi kendaraan masuk ke dalam suatu provinsi tentu saja berdampak kepada penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi tersebut. Semakin banyak jumlah kendaraan masuk, maka semakin besar pula penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa kendaraan yang bermutasi masuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tentu saja harus mengikuti aturan daerah setempat dengan membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak jumlah kendaraan yang bermutasi masuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, otomatis akan meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.

Variabel tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tanda negatif, dan tidak signifikan mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Meskipun secara statistik tidak signifikan mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan tetapi jika dilihat dari koefisien regresinya sebesar -0.029306. Angka ini berarti bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat mengurangi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk setiap kenaikan sebesar 1 persen jumlah tunggakan maka akan mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0.29 persen.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa dari tahun ke tahun jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya aturan yang tegas untuk menindak para penunggak pajak belum ada sehingga tidak ada efek jera terhadap para penunggak pajak sehingga dari tahun ke tahun jumlah penunggak pajak terus bertambah. Faktor lain diantaranya pemilik kendaraan bermotor yang tercatat belum dibayar sudah pindah dari wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga sulit lagi untuk diminta kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor lain adalah banyak para wajib pajak belum mempunyai kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga menyulitkan tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dengan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara membuat pihak terkait (Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara) untuk dapat menyesuaikan target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun lalu sehingga dihasilkan target penerimaan pajak yang realistis.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sidik (2002) yang menyatakan bahwa beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak yaitu Lemahnya

penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak yang terkadang dilakukan oleh oknum pejabat atau penyelenggara Negara serta masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke Negara sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara dari sektor pajak.

Jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang meningkat menunjukkan bahwa terjadi peningkatan obyek pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu diperlukan intensifikasi dari Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara selain bertujuan untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor juga dimaksudkan agar pemerintah dapat memperkirakan secara pasti penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk setiap tahun berjalan.

5.KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut
1. Bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan dari variabel Jumlah Kendaraan bermotor (X1), PDRB Per Kapita (X2), Mutasi Kendaraan Masuk (X3) dan Tunggakan Pajak (X4) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.
 2. Secara Parsial, hanya variabel tunggakan pajak kendaraan bermotor (X4) yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel Jumlah Kendaraan Bermotor, PDRB per Kapita, Jumlah Mutasi Kendaraan Masuk positif dan secara statistik signifikan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.
 3. Tunggakan pajak kendaraan bermotor secara statistik tidak signifikan mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tetapi jika dilihat dari koefisien regresinya sebesar -0.029306 angka ini berarti bahwa dapat mempengaruhi penerimaan, dimana untuk setiap kenaikan sebesar 1 persen jumlah tunggakan maka akan mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0.29 persen, hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih kurang serta tidak adanya tindakan yang tegas dari pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya, sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

6.REFERENSI

- Agustiningtyas, Veronika Winarti. 2003. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah (Tahun 1998-2001). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Amelia, Yessy Afriani. 2008. Upaya Optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah periode 2003-2007 (Studi Kasus di Kantor Samsat Jakarta Barat). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Binus. Jakarta.
- Bohari. 2010. Pengantar Hukum Pajak. Rajawali Pers.Jakarta
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). PT Indeks. Jakarta
- Devas, Nick. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. UI Press. Jakarta.
- Djalal, Nachrowi. 2006. Ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan, FEUI, Jakarta
- Gujarati, Damodar N.2003 Ekonometrika Dasar. Cetakan Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.

- Haniz, Nadya Fazriana. 2013. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Tegal. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hariyudha, Reza. 2009. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Usaha, Pertumbuhan PDRB dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kota Kediri).Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Hasnuri, Zulfah Dwi. 2014. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kab/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2013). Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hoetomo. 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Mitra Pelajar. Surabaya.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2007. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta
- Iswandi, Riwisa. 2014. Analisis Pajak Kendaraan bermotor Provinsi Kalimantan Barat. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2003. "Pajak dan Retribusi Daerah". Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005."Pajak dan Retribusi Daerah". Cetakan Kedua. UII Press. Yogyakarta
- Kristiyawan, Dionisius Toni. 2014. Analisis Pengaruh Tunggakan pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan asli Daerah (Studi Kasus pada Up3ad Samsat Surakarta). Fakultas Ekonomi UNS. Surakarta.
- Mangkoesobroto, Guritno. 1998. Ekonomika Publik. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011, Perpajakan. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta
- Margono. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Musgrave, Richard. 1993. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Nachrowi. 2006. Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. FE UI. Jakarta.
- Norman, Novak. 1970. Tax administration in theory and Practice. Praeger Publisher. New York.
- Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta
- Rosidi, M. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Pekanbaru Selatan. Jurusan akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pekanbaru.
- Riduwan. 2004. Metode dan teknik menyusun tesis. Alfabeta. Bandung
- Sadono, Sukirno. 1999. Pengantar Teori Makro Ekonomi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Samudra, Azhari. 2005. Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi. PT. Hecca Publishing. Jakarta.
- Siahaan P, Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit Grafindo. Jakarta
- Sidik, Mahfud. 2002. Strategi meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penggalan potensi daerah dalam rangka otonomi daerah. Disampaikan dalam orasi ilmiah di STIA LAN Bandung 10 April 2002.
- Siradjah, Jafar Nurdin. 2014. Tinjauan Hukum terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Samsat Wilayah Maros. Universitas Hasanuddin. Makassar

- Soegijoko, Soegiyanto. 1994. Prospek pertumbuhan daerah perkotaan dalam PJP II Bunga Rampai perencanaan pembangunan di Indonesia. PT. Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sule, Ernie Trisnawati dan Saefullah, Kurniawan. 2005. Edisi pertama. Pengantar Manajemen. Kencana: Jakarta.
- Suliyanto. 2006. Metode Riset Bisnis, Andi, Yogyakarta
- Sumarsan, Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru). PT Indeks. Jakarta
- Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Graha Indonesia. Bogor.
- Tim Penyusun UNHALU. 2012. Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi (revisi tahun 2012). Universitas Haluoleo Press, Kendari.
- Tjahjono, Ahmad dan Fakhry, Husein Muhammad. 2009. Perpajakan. Edisi Keempat. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Tuanakotta, Theodorus. 2003. Teori Akuntansi. Selemba Empat: Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perubahan Atas UU RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- _____, RI Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas UU RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- _____, RI Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
- _____, RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Usmani, Muhammad Lutfi Nur. 2012. Pengaruh kendaraan bermotor baru, mutasi masuk dan mutasi keluar kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor; studi kasus pada sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Ciledug, kota Tangerang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Utami, Ayu Trani. 2014. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Waluyo, Joko. 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Yogyakarta.
- Widarjono, Agus. 2007. Ekonometrika : Teori dan aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Kedua. FE UII. Yogyakarta.
- Widodo, HG. Suseno. 1990. Indikator Ekonomi dasar perhitungan Perekonomian Indonesia. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.